

INTEGRASI PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF EKOFEMINISME

(Studi Pendahuluan Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan di Perbatasan Kepulauan Riau)

Siti Arieta¹, Nikodemus Niko^{2*}, Nanik Rahmawati³, Sri Wahyuni⁴, Suryaningsih⁵

¹⁻⁵Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Indonesia

*nikodemusn@umrah.ac.id

ABSTRACT

This research examines the integration of mining development in the border region of the Riau Islands from an ecofeminist perspective. The study was conducted using a qualitative approach, through in-depth interviews with various stakeholders, document analysis, and direct observation in the field. The aim of this research is to explore the impact of the planned mining development in the border region of the Riau Islands on the environment and women. The results show that the planned mining development in the border region of the Riau Islands has a negative impact on the environment and women. The dredging of sea sand around small islands in the border region of the Riau Islands has led to damage to the marine ecosystem and has had an impact on the livelihoods of local fishermen, the majority of whom are women. In addition, the planned mining development also has negative health effects on women, who are exposed to harmful chemicals from mining. From an ecofeminist perspective, development integration must consider gender and environmental aspects. Therefore, this research recommends that the government conduct a reassessment of the planned mining development in the border region of the Riau Islands, taking into account its impact on the environment and women. Additionally, empowering women in decision-making related to mining development is necessary. This is expected to achieve sustainable and more inclusive development that considers the rights of women and the environment.

INFORMASI ARTIKEL	
Sejarah Artikel	:
Diterima	: 01 Juni 2022
Disetujui	: 01 September 2023
Alamat Email:	nikodemusn@umrah.ac.id
Correspondence Author:	Nikodemus Niko
SSN (PRINT)	: 1412-1411
ISSN (ONLINE)	: 2722-7057

Keyword: Development, Ecofeminism, Mining Area, National Borders

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji integrasi pembangunan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau dari perspektif ekofeminisme. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, analisis dokumen, serta observasi langsung di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak dari rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau terhadap lingkungan dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau berdampak negatif terhadap lingkungan dan perempuan. Pengerukan pasir laut yang dilakukan di sekitar pulau-pulau kecil di perbatasan Kepulauan Riau mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan berdampak pada keberlangsungan hidup nelayan setempat, yang mayoritas di antaranya adalah perempuan. Selain itu, rencana pengembangan pertambangan juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan perempuan, yang terpapar oleh zat-zat kimia berbahaya dari pertambangan. Dalam perspektif ekofeminisme, integrasi pembangunan harus mempertimbangkan aspek gender dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan perempuan. Selain itu, perlu juga dilakukan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan kawasan pertambangan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan lebih inklusif, yang memperhatikan hak-hak perempuan dan lingkungan.

Kata Kunci: Pembangunan, Ekofeminisme, Kawasan Pertambangan, Perbatasan Negara

PENDAHULUAN

Penelitian ini tentang integrasi pembangunan berperspektif ekofeminisme dengan studi pada rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral seperti timah dan bauksit. Namun, eksploitasi sumber daya alam tersebut seringkali tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau, khususnya, telah menjadi fokus rencana pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Namun, pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek-aspek penting lainnya, seperti keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial (Arieta et al., 2022; Niko & Yulasteriyani, 2020). Pada saat yang sama, teori ekofeminisme menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara diskriminasi gender dan kerusakan lingkungan (Eaton, 2021). Bagi perempuan—masyarakat suku asli—koneksi psikologis dengan tanah leluhur merupakan hal yang terjadi secara alamiah (Niko, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana integrasi pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif ekofeminisme dalam rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perspektif ekofeminisme dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu yang

muncul dalam pembangunan kawasan pertambangan, seperti dampak lingkungan, kerusakan sosial, dan ketidakadilan gender.

Eksplorasi sumber daya alam pertambangan di Kepulauan Riau telah menjadi fokus utama rencana pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Kawasan tersebut kaya akan sumber daya mineral seperti timah, bauksit, dan bijih besi. Namun, eksploitasi tersebut seringkali tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Beberapa masalah yang muncul akibat eksploitasi sumber daya alam pertambangan di Kepulauan Riau antara lain adalah kerusakan lingkungan, degradasi lahan, peningkatan polusi, dan penurunan kualitas air dan udara (Abadi, 2017; Zainul, 2019). Selain itu, eksploitasi sumber daya alam pertambangan juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, seperti peningkatan kesenjangan ekonomi antara penduduk lokal dan pengusaha tambang (Setyadiharja, 2016).

Meskipun eksploitasi sumber daya alam pertambangan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, namun harus diimbangi dengan kebijakan dan tindakan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan gender. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan perspektif ekofeminisme dalam rencana pengembangan kawasan pertambangan, sehingga dapat dilakukan integrasi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan di Perbatasan Kepulauan Riau

menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan, di antaranya:

Dampak lingkungan: Eksploitasi sumber daya alam pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, seperti degradasi lahan, penurunan kualitas air dan udara, serta peningkatan polusi. Hal ini dapat merusak ekosistem di sekitar kawasan pertambangan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Bahkan pada situasi tertentu dapat menimbulkan kerawanan pangan pada masyarakat di wilayah perbatasan (Niko & Atem, 2020).

Kerusakan sosial: Aktivitas pertambangan dapat menimbulkan kerusakan sosial, seperti perpindahan penduduk, pemaksaan tanah, dan meningkatnya kesenjangan ekonomi antara penduduk lokal dan pengusaha tambang.

Ketidakadilan gender: Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam aktivitas ekonomi di kawasan pertambangan masih sangat terbatas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan gender dan memperburuk kondisi ekonomi dan sosial perempuan di wilayah tersebut, imbasnya kemiskinan perempuan yang semakin bertambah parah (Niko, 2019).

Kurangnya partisipasi masyarakat: Rencana pengembangan kawasan pertambangan seringkali tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Hal ini dapat mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik.

Oleh karena itu, dalam mengembangkan Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan di Perbatasan Kepulauan Riau, perlu dilakukan integrasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperhatikan dampak lingkungan, kerusakan sosial, ketidakadilan gender, dan partisipasi masyarakat (Lihat juga Niko & Samkamaria, 2019).. Selain itu, diperlukan juga keterlibatan aktif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau, serta memperkaya pemahaman teori ekofeminisme dalam konteks pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ekofeminisme

Ekofeminisme adalah sebuah teori yang menghubungkan antara kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ekofeminisme menekankan pentingnya memperhatikan hubungan simbiosis antara manusia dan lingkungan, serta pentingnya memperhatikan peran perempuan dan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam literatur review Perspektif Ekofeminisme, penelitian akan membahas beberapa konsep

kunci dan pemikiran dalam teori ekofeminisme.

Pertama, salah satu konsep kunci dalam ekofeminisme adalah bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan sangatlah penting. Ekofeminis percaya bahwa hubungan manusia dengan lingkungan memainkan peran kunci dalam menentukan keberlanjutan dan kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, lingkungan dianggap sebagai sumber kehidupan dan perempuan dipandang sebagai penjaga alam.

Kedua, ekofeminisme menekankan pentingnya memperhatikan gender dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, perempuan seringkali dipandang sebagai kelompok yang lebih rentan terhadap dampak lingkungan yang buruk. Dalam konteks pertambangan, perempuan seringkali terdampak secara langsung oleh aktivitas pertambangan, baik secara ekonomi maupun sosial.

Ketiga, ekofeminisme menganggap bahwa pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat lokal sangatlah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengambilan keputusan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas manusia. Dalam konteks pertambangan, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dapat membantu dalam memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan.

Keempat, ekofeminisme menekankan pentingnya pandangan dunia yang berkelanjutan dan holistik. Dalam pandangan ini, ekofeminisme mempertimbangkan

hubungan simbiosis antara manusia dan lingkungan dalam jangka panjang, dan memastikan bahwa pengambilan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks pertambangan, hal ini berarti mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas tambang dalam jangka panjang, dan memastikan bahwa pengambilan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.

Pembangunan yang memiliki perspektif ekologi feminisme adalah pembangunan yang mempertimbangkan kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini mengakui bahwa manusia dan lingkungan hidup saling berhubungan dalam sebuah ekosistem, dan keseimbangan dalam hubungan ini sangatlah penting untuk kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup planet ini.

Para ahli ekofeminisme memiliki pandangan yang beragam namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan erat. Beberapa pendapat para ahli ekofeminisme adalah sebagai berikut:

Shiva (1993), seorang aktivis dan akademisi India, menekankan pentingnya menggabungkan perspektif ekologi dan feminisme. Menurutnya, ekofeminisme adalah gerakan yang muncul sebagai hasil dari ketidakpuasan terhadap gerakan feminis dan gerakan lingkungan yang memandang alam sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Mies (1983), seorang sosiolog asal Jerman, berpendapat bahwa perempuan seringkali menjadi korban dari eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Menurutnya, perempuan

seringkali diabaikan dalam proses pembangunan, dan kepentingan mereka diabaikan demi keuntungan ekonomi.

Gaard (1993), seorang akademisi Amerika Serikat, menekankan pentingnya memperhatikan peran perempuan dalam konservasi lingkungan. Menurutnya, perempuan seringkali memiliki pengetahuan dan pengalaman yang penting dalam konservasi lingkungan, dan mereka perlu diakui dan didukung dalam upaya konservasi.

Merchant (1980), seorang sejarawan lingkungan asal Amerika Serikat, menekankan pentingnya memperhatikan peran perempuan dalam sejarah lingkungan. Menurutnya, perempuan seringkali terlibat dalam praktik-praktik alami yang berkelanjutan seperti pertanian dan pengumpulan bahan makanan, dan sejarah lingkungan harus diulas kembali dengan memperhatikan peran perempuan.

King (1989), seorang aktivis dan akademisi Amerika Serikat, menekankan pentingnya menggabungkan perspektif feminis dan ekologi dalam memerangi kapitalisme dan sistem ekonomi yang tidak berkelanjutan. Menurutnya, ekofeminisme adalah gerakan sosial dan politik yang muncul sebagai hasil dari penolakan terhadap sistem ekonomi yang merusak lingkungan dan mengabaikan kepentingan perempuan.

Pendapat para ahli ekofeminisme ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekofeminisme, manusia dan lingkungan hidup saling berkaitan dan harus diperlakukan secara seimbang dan adil.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi kasus, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang fenomena yang diteliti (Cresswell, 2014). Kemudian, pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini akan mengkaji secara mendalam fenomena integrasi pembangunan berperspektif ekofeminisme pada rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau.

Pada tahap awal, peneliti melakukan studi literatur untuk mengumpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan ekofeminisme, integrasi pembangunan, dan rencana pengembangan kawasan pertambangan. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci yang terkait dengan rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau, seperti pejabat pemerintah daerah, perwakilan perusahaan tambang, dan masyarakat setempat.

Pada studi pendahuluan ini, peneliti menggunakan data literatur review. Data yang diperoleh dari studi literatur kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Metode analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema atau pola-pola yang muncul dalam data. Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kata-kata kunci atau frasa-

frasa yang muncul dalam data, dan kemudian mengelompokkan kata-kata kunci atau frasa-frasa tersebut ke dalam tema-tema atau pola-pola tertentu. Hasil analisis isi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, hasil penelitian juga disajikan dalam bentuk naratif dan disertai dengan kutipan-kutipan dari informan kunci untuk memperkuat temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Karimun Sebagai Wilayah Perbatasan Laut

Kabupaten Karimun adalah sebuah kabupaten kepulauan yang memiliki karakteristik unik dan menarik. Wilayah ini terletak di antara koordinat 0°35' hingga 1°10' Lintang Utara dan 103°30' hingga 104° Bujur Timur, dengan Tanjungbalai Karimun, Pulau Karimun sebagai pusat pemerintahannya. Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa pulau besar dan ratusan pulau kecil, yang totalnya mencapai 250 pulau yang sudah diberi nama. Namun, hanya 57 pulau yang dihuni oleh penduduk.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah Terdepan dan Terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Secara administratif, Kabupaten Karimun berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di sebelah utara, Kota Batam di sebelah timur, Kabupaten Indragiri Hilir di sebelah selatan, serta Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan di sebelah barat. Kabupaten Karimun memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 7.984 km², yang terdiri dari daratan seluas 1.524 km² dan lautan seluas 6.460 km².

Kabupaten Karimun terbagi menjadi 12 kecamatan dan 71 desa/kelurahan. Dari 12 kecamatan tersebut, terdapat Moro, Durai, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar, Belat, Karimun, Buru, Meral, Tebing, dan Meral Barat. Setiap kecamatan memiliki wilayah dan karakteristik yang berbeda, yang mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi di Kabupaten Karimun.

Kabupaten Karimun memiliki posisi strategis sebagai wilayah Terdepan dan Terluar Indonesia. Wilayah ini juga merupakan pusat jalur perdagangan maritim, terutama melalui Pelabuhan Tanjungbalai Karimun. Posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta berada di jalur pelayaran internasional, menjadikan Kabupaten Karimun sebagai wilayah yang potensial dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan dan pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan dan pemberdayaan potensi wilayah, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Karimun dan Kundur merupakan dua pulau besar yang menjadi pusat permukiman dan sentra ekonomi di Kabupaten Karimun. Meski demikian, tiap pulau di Kabupaten Karimun memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi. Hal ini mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi di wilayah tersebut.

Kabupaten Karimun memiliki potensi alam dan kekayaan bahari yang berlimpah, seperti perikanan, kelapa sawit, dan

pariwisata. Hal ini menjadikan Kabupaten Karimun sebagai wilayah yang potensial untuk dikembangkan, terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan dan pemberdayaan potensi wilayah, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Kabupaten Karimun sebagai salah satu wilayah kepulauan terdepan dan terluar Indonesia.

Kabupaten Karimun memiliki populasi yang heterogen dengan mayoritas penduduknya berasal dari etnis Melayu, yang juga merupakan kelompok etnis terbesar di wilayah Kepulauan Riau. Selain itu, terdapat pula komunitas Tionghoa dan beberapa etnis lainnya yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah

Kabupaten Karimun yang berdekatan dengan Pulau Sumatera juga memungkinkan daerah ini menjadi pusat transit dan interaksi antara penduduk dari Sumatera dengan penduduk dari wilayah-wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau seperti Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Dalam interaksi sosial, masyarakat Karimun dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan terbuka terhadap keberagaman etnis. Mereka memiliki tradisi dan budaya yang unik dan masih dijaga hingga saat ini, seperti seni tari zapin, seni musik kuda kepang, dan adat pernikahan tradisional.

Kabupaten Karimun memiliki banyak perusahaan asing, terutama di bidang galangan kapal seperti Saipem, dan perusahaan tersebut cenderung merekrut pekerja dari luar negeri, seperti Korea Selatan, Malaysia, India, dan Filipina. Sebagai akibatnya, pekerja lokal dari Kabupaten Karimun terbilang sedikit karena mereka tidak memiliki pendidikan atau keterampilan yang cukup untuk memenuhi persyaratan perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Karimun telah mengeluarkan sertifikat keterampilan, terutama di bidang industri, termasuk keterampilan mengelas. Namun, sertifikat ini belum dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan asing tersebut karena perusahaan asing tersebut mempunyai standar sertifikasi sendiri sesuai dengan standar ISO. Akibatnya banyak tenaga kerja produktif yang tidak bekerja di wilayah ini.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Karimun memiliki banyak perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut, namun tenaga kerja lokal masih menghadapi kendala untuk bergabung dengan perusahaan tersebut karena kurangnya pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan standar perusahaan asing. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal agar mereka dapat memenuhi persyaratan perusahaan-perusahaan asing dan meningkatkan kesempatan kerja di wilayah tersebut.

Kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan Kepulauan Riau

Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan (RPKP) merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan sektor pertambangan di suatu wilayah tertentu. RPKP biasanya dibuat untuk jangka waktu 5-10 tahun dan berisi target produksi, teknologi yang digunakan, serta strategi pengelolaan sumber daya alam yang terkait.

Dalam RPKP, pemerintah biasanya menetapkan kawasan-kawasan tertentu sebagai daerah pertambangan, yang kemudian diatur penggunaannya. Kebijakan RPKP bertujuan untuk meningkatkan produksi pertambangan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah setempat dan negara secara keseluruhan.

Namun, kebijakan RPKP juga dihadapkan pada berbagai masalah, seperti dampak lingkungan yang merusak, kerusakan habitat, dan konflik dengan masyarakat adat atau penduduk lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap implementasi RPKP agar dampak negatif dari kebijakan tersebut dapat diminimalkan.

Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan (RPKP) di Kepulauan Riau merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan produksi pertambangan di wilayah tersebut. RPKP di Kepulauan Riau fokus pada pengembangan sektor tambang bauksit, timah, dan bijih besi.

Salah satu kawasan yang menjadi sasaran RPKP di Kepulauan Riau adalah kawasan perbatasan antara Indonesia dan Singapura, seperti Pulau Kundur, Pulau Karimun, dan Pulau Batam. Pemerintah daerah dan perusahaan tambang berupaya mempercepat proses izin pertambangan dan pengembangan infrastruktur untuk menarik investor dan meningkatkan produksi.

Pelaksanaan RPKP di Kepulauan Riau dihadapkan pada berbagai masalah, seperti konflik dengan masyarakat adat dan penduduk lokal, dampak lingkungan yang merusak, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan. Beberapa masyarakat adat dan organisasi lingkungan telah mengkritik RPKP di Kepulauan Riau karena dianggap merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat adat serta organisasi lingkungan dalam pelaksanaan RPKP di Kepulauan Riau. Perlu juga dilakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap implementasi RPKP agar dampak negatif dari kebijakan tersebut dapat diminimalkan dan kepentingan semua pihak dapat terpenuhi.

Dalam perspektif ekofeminisme, Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan (RPKP) di Kepulauan Riau dapat dikritisi karena cenderung mengabaikan nilai-nilai ekologis dan perempuan. RPKP seringkali lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dan pembangunan infrastruktur daripada memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

Menurut pandangan ekofeminisme, alam dan perempuan memiliki keterkaitan yang erat. Perempuan seringkali berperan

sebagai penjaga lingkungan dan sumber daya alam, sehingga pembangunan yang tidak memperhatikan perempuan dapat berdampak negatif pada lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Keterkaitan ini seringkali diabaikan dalam RPKP, yang lebih mengedepankan kepentingan perusahaan dan investor daripada masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, perspektif ekofeminisme menekankan pentingnya memperhatikan dampak gender dalam kebijakan pembangunan. RPKP di Kepulauan Riau cenderung mengabaikan peran perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan ini dapat memperburuk ketimpangan gender dan merugikan perempuan.

Dalam konteks RPKP di Kepulauan Riau, pendekatan ekofeminisme menekankan perlunya memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan penduduk lokal dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Perlu juga dilakukan evaluasi yang transparan dan partisipatif untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Dalam hal ini, perlu adanya dialog dan konsultasi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat adat serta organisasi lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Mengafirmasi Perspektif Ekofeminisme Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan di Perbatasan Kepulauan Riau

Perspektif ekologi feminisme menekankan pentingnya memperhatikan peran perempuan dalam pembangunan yang

berkelanjutan. Perempuan seringkali berperan sebagai penjaga lingkungan, dan secara historis mereka terlibat dalam praktik-praktik alami yang berkelanjutan seperti pertanian, pengumpulan bahan makanan, dan konservasi sumber daya alam. Oleh karena itu, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dapat membantu untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, perspektif ekologi feminisme juga menekankan pentingnya memperhatikan perbedaan gender dalam dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan. Perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda terhadap lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, mempertimbangkan perbedaan gender dalam perencanaan pembangunan dapat membantu untuk mengurangi dampak buruk pada masyarakat lokal dan lingkungan.

Pembangunan yang memiliki perspektif ekologi feminisme juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengambilan sumber daya alam, serta efek dari perubahan iklim. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan pengambilan sumber daya alam, tetapi juga mempertimbangkan cara penggunaannya agar tidak mengakibatkan dampak yang merugikan pada lingkungan dan masyarakat lokal.

Dalam praktiknya, pembangunan yang memiliki perspektif ekologi feminisme dapat diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian dan pelestarian sumber daya alam, pengembangan teknologi ramah lingkungan,

pengaturan sistem keuangan dan pajak yang mempertimbangkan dampak lingkungan, serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Dengan mengadopsi perspektif ekologi feminisme dalam pembangunan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, di mana kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan dianggap sebagai prioritas utama.

Rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau dapat menghadirkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan perspektif ekofeminisme dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pertambangan tersebut.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengafirmasi perspektif ekofeminisme pada rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau antara lain:

1. Mengakui peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam

Perempuan seringkali memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan lahan pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, penting untuk mengakui peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pertambangan.

2. Memperhatikan dampak sosial dan lingkungan pada masyarakat sekitar

Rencana pengembangan kawasan pertambangan harus mempertimbangkan

dampak sosial dan lingkungan pada masyarakat sekitar, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Pengambil kebijakan harus memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

3. Memastikan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan

Partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan sangat penting dalam mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari rencana pengembangan kawasan pertambangan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan harus memastikan bahwa masyarakat sekitar terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

4. Memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan masyarakat asli

Rencana pengembangan kawasan pertambangan harus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diberikan dalam proses perencanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa integrasi pembangunan berperspektif ekofeminisme dapat menjadi alternatif solusi dalam menghadapi rencana pengembangan kawasan pertambangan di perbatasan Kepulauan Riau. Integrasi pembangunan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat setempat, serta memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk

terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi kerusakan lingkungan akibat rencana pengembangan kawasan pertambangan tersebut. Selain itu, dampak sosial seperti konflik lahan dan ketidakadilan gender juga dapat terjadi. Oleh karena itu, integrasi pembangunan berperspektif ekofeminisme yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan gender sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengidentifikasi peran perempuan dalam lingkup pengambilan keputusan pembangunan, serta menemukan bahwa partisipasi perempuan masih minim dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, integrasi pembangunan berperspektif ekofeminisme harus memperkuat partisipasi perempuan dalam setiap tahap proses pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perempuan, dalam menentukan rencana pengembangan kawasan pertambangan. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan kapasitas dan pengembangan keterampilan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan integrasi pembangunan berperspektif ekofeminisme dan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, M. R. (2017). Rencana Biaya

Reklamasi Program Pasir Kuarsa Di Pt Tri Panorama Setia. *Teknologi Pertambangan*, 3(1), 150–158.

Arieta, S., Niko, N., Rahmaniah, S. E., Rupita, R., & Igiyasi, T. S. (2022). Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(3), 615-628.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D. C.: SAGE Publication, Inc.

Eaton, H. (2021). Ecofeminist Theologies in the Age of Climate Crisis. *Feminist Theology*, 29(3), 209–219. <https://doi.org/10.1177/0966735021100605>

Gaard, G. (1993). *Ecofeminism: Women, animals, nature*. Temple University Press.

King, Y. (1989). *Healing the wound: Ecofeminism, the environment, and the third world*. In A. Grewal & C. Kaplan (Eds.), *Scattered hegemonies: Postmodernity and transnational feminist practices* (pp. 357-374). University of Minnesota Press.

Merchant, C. (1980). *The death of nature: Women, ecology, and the scientific revolution*. Harper & Row.

Mies, M. (1983). *Towards a methodology for feminist research*. In S. Harding & M. B. Hintikka (Eds.), *Discovering reality: Feminist perspectives on epistemology, metaphysics, methodology, and philosophy of science* (pp. 181-199). Springer.

Niko, N., & Yulasteriyani, Y. (2020). Pembangunan Masyarakat Miskin Di Pedesaan Perspektif Fungsionalisme Struktural. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah*

- Dan Sosial*, 3(02), 213–225. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v3i02.476>
- Niko, N. (2020). Gender Struggle : What Can We Learn from the Dayak Benawan Women? *Asia Social Issues*.13(2), 269–292.
- Niko, N. (2019). Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan di Kalimantan Barat sebagai Bentuk Kolonialisme Baru. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 58-76.
- Niko, N., & Samkamaria, S. (2019). Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2), 104-114.
- Niko, N., & Atem, A. (2020). Persoalan kerawanan pangan pada masyarakat miskin di wilayah perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(2), 94-104.
- Setyadiharja, R. (2016). Problematika Bauksit di Tanah Gurindam (Analisis Proses Legislasi Kebijakan Tambang Bauksit di Kota Tanjungpinang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.433>
- Shiva, V. (1993). *Ecofeminism: Women, culture, nature*. Zed Books.
- Zainul, M. (2019). Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 887–896.